

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Istilah “*global village*” adalah gambaran atas dunia sebagai tempat tinggal yang semakin sempit karena masyarakatnya sudah terhubung satu sama lain melalui teknologi informasi dan komunikasi (McLuhan, 1994, hlm. 5). Memasuki abad 21, setiap negara di dunia akan menghadapi berbagai permasalahan global yang perlu ditangani oleh setiap negara dengan serius. Berbagai permasalahan atau isu global yang saat ini marak terjadi diantaranya meningkatnya interdependensi dan daya saing antar negara, kekerasan dan perang antar etnis, terorisme terorganisir, pembangunan berkelanjutan dan kerusakan lingkungan serta semakin pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang juga memiliki berbagai dampak negatif (Gacel dan Avila, 2015; Cogan dan Derricot, 1998, hlm. 7; UNESCO, 2015; Wahab dan Sapriya, 2012, hlm. 236). Solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut membutuhkan kerjasama dari berbagai negara. Jika berbagai permasalahan tersebut tidak segera diatasi maka dunia akan mengalami kehancuran dengan cepat karena konflik dan kerusakan lingkungan.

Studi yang dilakukan The UN Refugee Agency tentang *Global Trends, Forced Displacement* menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2017 sebanyak 68,5 juta orang dan lebih setengahnya atau 52 % merupakan anak-anak di bawah 18 tahun, secara paksa di pindahkan dari negara satu ke negara lain karena menjadi korban penganiayaan, konflik dan kekerasan. Populasi ini meningkat sebanyak 2,9 juta orang dari tahun 2016 dan konflik suriah berkontribusi signifikan atas peningkatan ini (UNHCR,2017). Semakin meningkatnya perpindahan penduduk yang membawa identitas berupa latar belakang budaya imigran mendorong pandangan kosmopolitan dan kewargaan global (Anker, 2017. hlm.73)

Selain permasalahan kekerasan dan konflik negara yang menyebabkan terbentuknya pandangan cosmopolitan, permasalahan global yang juga butuh perhatian adalah pembangunan berkelanjutan dan kerusakan alam. Pada laporan lingkungan tentang kesenjangan emisi yang dilakukan oleh *United Nations Enviroment Programms* (UNEP) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa zat karbon

dioksida (CO^2) di dunia meningkat pada tahun 2017 setelah beberapa tahun mengalami stagnasi. Pemanasan global juga meningkat 3^0 pada akhir abad ini dan akan berakibat fatal pada negara kepulauan dan pesisir. Kekeringan dan kebakaran hutan meningkat signifikan sebesar 23% dari berbagai negara di belahan dunia dan perubahan ekstrim iklim sudah sering terjadi di dunia kita (UNEP, 2018). Indonesia sendiri, pada dokumen Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, sepanjang tahun 2017 masalah lingkungan utama adalah kesenjangan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan air bersih, kesalahan dalam pemanfaatan kawasan hutan, meningkatnya emisi gas rumah kaca dan bahan perusak ozon residu serta bencana alam. (SLHI, 2017).

Dampak lain dari globalisasi adalah terkikisnya karakter atau jati diri bangsa. Setidaknya terdapat tujuh krisis moral di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang global yaitu krisis kejujuran, krisis tanggung jawab, krisis berpikir jauh kedepan, krisis disiplin, krisis kebersamaan, krisis keadilan dan krisis kepedulian. Selain itu, isu hoax dan ujaran kebencian di media sosial juga banyak tersebar dengan akar konflik SARA yang mengancam kesatuan dan kebersamaan bangsa (Koesoma, 2007, hlm.222). Ini memperlihatkan bahwa globalisasi juga dapat mengikis nilai-nilai jati diri bangsa.

Pada hubungan antar negara bangsa di tataran bilateral, regional dan multilateral antar negara, globalisasi memberikan ruang bagi aktor negara untuk membentuk sebuah “organisasi internasional” sebagai muara bersama untuk membahas isu-isu global dan solusi pemecahannya. Organisasi bersama ini disebut *global governance*, *global governance* adalah gerakan pelebagaan pelaku-pelaku politik lintas negara yang bertujuan mencari solusi bagi permasalahan yang di alami bebarapa negara atau kawasan. (Arneil, 2007). Dalam tataran regional, Indonesia telah tergabung pada *ASEAN community*, secara tidak langsung kita dituntut untuk menyusun dan menata kembali kebijakan-kebijakan yang terarah agar lebih mendorong dan meningkatkan daya saing (*competitiveness*) sumber daya manusia dan industri di dunia. Data World Economic Forum (WEF) tentang *Global Competitiveness*, Indonesia menempati peringkat 36 dan masih di bawah negara

ASEAN lainnya yakni Malaysia dan Thailand (WEF, 2018). Data ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya bagi bangsa kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sumber daya manusia dan ekonomi Industri di kancah Internasional.

Berbagai permasalahan dan kebutuhan diatas, maka diperlukan pemahaman dan wawasan global generasi muda untuk warga kontemporer saat ini. Perspektif global menjadi salah satu kebutuhan utama dalam warga negara kontemporer dikarenakan semakin meningkatnya permasalahan dunia yang cara penyelesaiannya membutuhkan saling ketergantungan dan kerjasama dari semua bangsa (Wahab dan Sapriya, 2011, hlm. 235-237). Kedudukan tambahan sebagai warga negara global ini memerlukan sebuah kemampuan dan kompetensi warga global. Kemampuan untuk dapat berpikir dan memahami secara global tidak hanya tentang dirinya dan negaranya namun juga tentang permasalahan dunia. Kemampuan dan kompetensi warga negara global haruslah ditransformasikan dalam proses pendidikan formal. Pendidikan saat ini seharusnya melahirkan lulusan dengan pola pikir intelektual dan nasionalis serta bagaimana mendorong peserta didik sebagai warga global yang selaras dengan dengan nilai-nilai universal. Penting bagi peserta didik untuk memiliki perspektif dan kemampuan tentang bagaimana dia saling terhubung satu sama lain dengan peserta didik di belahan dunia lainnya (Sarabhai, 2013). Pembentukan warga global melalui pendidikan dapat melalui pendekatan Pendidikan kewarganegaraan global.

Pendidikan kewarganegaraan global adalah upaya lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membangun pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang dibutuhkan peserta didik agar dapat berkontribusi pada dunia yang adil, damai dan berkelanjutan, menerapkan perspektif pembelajaran sepanjang hayat dari usia dini hingga perguruan tinggi dengan kolaborasi pendekatan formal yakni kokulikuler, ekstrakulikuler maupun informal (UNESCO,2014;2015). Pendidikan perspektif global merupakan kebutuhan pendidikan saat ini yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada setiap kelompok sehingga unsur-unsur dalam kelompok tersebut dapat dipahami (Sapriya dan Wahab, 2011). Secara pengertian, pendidikan kewarganegaraan global adalah usaha membangun pengetahuan, keterampilan dan

sikap generasi muda agar memiliki perspektif dan kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan global menuju dunia yang adil dan damai dengan menggunakan pendekatan pendidikan formal. Inti dari kewarganegaraan global adalah keterlibatan warga negara dalam menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dari permasalahan tingkat lokal, nasional dan global.

Pada berbagai negara di belahan dunia, program pendidikan kewarganegaraan global telah menjadi berbincangan dan banyak negara berusaha merekonstruksi kurikulum guna menjawab tantangan dan kebutuhan kecenderungan global. Negara Australia menempatkan isu pendidikan kewarganegaraan global menjadi tujuan utama dalam sistem pendidikan mereka, dengan tema utama yakni perdamaian, keadilan sosial, keanekaragaman budaya dan pendidikan masa depan. Program pendidikan kewarganegaraan global diintegrasikan dalam pendidikan kewarganegaraan, sejarah dan geografi; menyediakan program pertukaran pelajar internasional; pengembangan ekstrakurikuler; program aksi mahasiswa serta meningkatkan etos dan lingkungan sekolah. Sedikit berbeda dengan Negara Selandia Baru, program pendidikan kewarganegaraanya tidak secara eksplisit tertulis dalam teks kurikulum namun diintegrasikan pada mata pelajaran bahasa dan ilmu sosial. Tujuannya adalah peserta didik dalam mengkaji berbagai permasalahan lokal, nasional dan global serta mendorong mereka untuk aktif dalam komunitas global (Peterson, Milligan & Wood, 2018).

Pada bagian Uni Eropa, isu pendidikan kewarganegaraan global tidak banyak di kaji dan dibahas sehingga belum ada rekonstruksi kurikulum dan menempatkan kewarganegaraan global sebagai isu penting, namun nilai-nilai kewargaan eropa selaras dengan kewarganegaraan global (Ross & Davies, 2018). Berbeda dengan negara-negara di wilayah timur tengah yang telah menempatkan kewarganegaraan global sebagai salah satu program penting dalam sistem pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran pedagogis partisipatif mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan global pada mata pelajaran sejarah, sosiopolitik dan budaya. Wilayah timur tengah menempatkan tema perdamaian dan HAM sebagai isu

utama (sebagai isu nasional dan global) selain tema lainnya yakni kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan (Kiwan, 2018).

Pada Benua Amerika bagian Amerika Utara, terdapat Kanada dan Amerika Serikat yang sama-sama menempatkan isu multikultural pada seluruh kebijakan publik. Pendidikan kewarganegaraan global mereka menggunakan pendekatan strategi pembelajaran pendekatan kritis untuk mendorong keterlibatan peserta didik pada pemecahan masalah global, selain itu juga berupaya membentuk ide guru dan siswa tentang pentingnya pendidikan global (Peck & Pashby, 2018). Pada bagian Amerika Latin, pendidikan kewarganegaraan global di integrasikan pada ilmu sosial dengan menempatkan isu anti imperialisme, hak asasi, lingkungan hidup dan perdamaian. Beberapa negara menyebutkan pendidikan kewarganegaraan global sebagai salah satu tujuan penting pendidikan seperti negara Peru dan Rika. (Sant & Valencia, 2018).

Hampir semua negara di wilayah Asia Timur dan Tenggara kecuali Myanmar, Vietnam, Kamboja dan Laos, telah berusaha membentuk kesadaran global warga negara pada pendidikan mereka. Negara-negara tersebut diantaranya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Cina, Malaysia dan Indonesia. Tema-tema pokok yang diajarkan oleh beberapa negara tersebut adalah hak asasi, daya saing global dan kebanggaan nasional serta arus migran transnasional yang mempengaruhi pembangunan identitas negara-negara tersebut. (Ching Ho, 2018).

Indonesia sendiri telah memasukkan tema-tema globalisasi dan hak asasi dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sejak tahun 2004. (Kalidjernih dalam Ching Ho, 2018). Pada Kurikulum 2006 maupun kurikulum 2013 tingkat menengah telah mencantumkan topik-topik dalam mempersiapkan warga global. Pada ranah pengetahuan warga negara, topik mencakup keadilan sosial, identitas dan kebangsaan, globalisasi dan ketergantungan antar negara, dan HAM. Pada ranah keterampilan warga negara, siswa dibekali keterampilan berempati, keterampilan komunikasi dan keterlibatan siswa dimasyarakat, sedangkan dalam watak warga negara membekali peserta didik untuk memiliki nilai-nilai kebhinnekaan, dan siswa dibangun agar memiliki jati diri sebagai warga negara yang beradab (Zaky, 2018)

Rekonstruksi kurikulum berparadigma pendidikan kewarganegaraan global perlu dilakukan dari pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah, hingga perguruan tinggi. Perguruan tinggi dan pendidikan secara umum harus melayani tatanan dunia yang memungkinkan pengembangan masyarakat yang lebih adil, toleran, dan bertanggung jawab. Perguruan tinggi haruslah menciptakan lulusan yang mempunyai kemampuan yang relevan dengan dunia yang sarat akan nilai globalisasi dan multikultural saat ini (Killick, 2018). Pada jenjang perguruan tinggi, tantangan globalisasi dijawab dengan berbagai kebijakan yang mampu mencetak lulusan dengan kompetensi dan kemampuan warga global. Tujuan pendidikan dalam perguruan tinggi haruslah memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik; kemampuan mengenali dan mendekati masalah sebagai masyarakat global; kemampuan memahami, menerima dan menghormati perbedaan budaya; kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan; dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional dan internasional (Aryana, 2017).

Saat ini diharapkan perguruan tinggi yang memiliki kurikulum dengan tujuan memberikan berbagai keterampilan dan pengetahuan warga negara bagi peserta didik yang mungkin tidak ada di jurusan mereka, menghasilkan pemikir kritis yang mengevaluasi ide baru dengan bukti, mempersiapkan peserta didik yang dapat hidup dalam masyarakat multikultural atau kosmopolitan serta menyediakan komunitas dimana kreatifitas dan pembelajaran aktif peserta didik dapat berkembang (Lewis, 2018). Ruang kelas atau pembelajaran di kelas saat ini haruslah menggunakan perspektif multikultural dan intercultural sebagai solusi atas keberagaman dunia dan isu keadilan dunia.

The Survey of Adult Skills atau riset tentang gambaran keterampilan warga negara produktif suatu negara (usia 16-65) dalam tiga keterampilan yakni literasi, berhitung dan pemecahan masalah dalam lingkungan yang canggih akan teknologi. Pada laporan tersebut, keterampilan membaca dan berhitung Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain, sekitar 70% dari jumlah responden berada pada level 2 kebawah. Kesenjangan gender lebih besar, dengan laki-laki yang

mendapatkan skor jauh lebih tinggi daripada perempuan dalam hal melek huruf dan angka. Keterampilan untuk mengakses, menafsirkan, dan menganalisis informasi yang ditemukan, diubah dan dikomunikasikan dalam lingkungan digital juga masih rendah dibandingkan negara-negara yang berpartisipasi. Pada laporan tersebut Indonesia berada di posisi terendah dari 34 negara yang berpartisipasi. (OCED, 2016). Maka perguruan tinggi harus memiliki paradigma untuk membentuk wawasan (*civic knowledge*) lulusan yang mampu menyikapi segala bentuk permasalahan yang ada dari tingkat lokal hingga global. Berbagai kebijakan tersebut membuka peluang bagi peserta didik dan membuat peserta didik lebih siap untuk dampak dari revolusi industri keempat (Revolusi Industri 4.0) saat ini.

Revolusi Industri 4.0 adalah generasi keempat dari perkembangan mesin yang ditandai dengan munculnya teknologi dan internet yang canggih masif. Teknologi dan informasi yang sangat mempengaruhi adanya perubahan perilaku dunia usaha dan dunia industri, perilaku masyarakat dan konsumen pada umumnya. Karakteristik di era revolusi industri tersebut meliputi digitalisasi, pengoptimalan produksi, otomatisasi dan adaptasi, interaksi antara manusia dengan mesin, nilai tambah layanan and bisnis, pertukaran data dan komunikasi secara otomatis, serta penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, dunia pendidikan dan industri harus mampu mengembangkan strategi transformasi industri dengan mempertimbangkan sektor sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya. Menurut Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir (2018), menyampaikan bahwa tantangan revolusi industri 4.0 harus direspon secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kemenristekdikti agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia ditengah persaingan. Untuk itu Perguruan tinggi wajib merumuskan kebijakan strategis dalam berbagai aspek mulai dari kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, serta pengembangan *cyber university*, dan pengembangan riset hingga inovasi.

Berdasarkan pendeskripsian permasalahan tersebut maka dibuatlah suatu penelitian yang akan mengkaji bagaimana pendekatan sebuah perguruan tinggi dalam mengkonseptualisasikan “kewarganegaraan global” pada berbagai kebijakan.

Pendekatan tersebut dengan melihat dan menganalisis bagaimana universitas melembagakan kewarganegaraan global dalam kurikulum, lingkungan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Lokasi Penelitian di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Surabaya. Universitas tersebut dipilih karena melihat visi misi dan rencana strategis universitas. Dalam Rencana Strategis Universitas Negeri Surabaya tahun 2016-2020 dijelaskan bahwa tema pengembangan untuk strategi pertumbuhan yang direkomendasikan adalah “Ekspansi Menuju Keunggulan Kependidikan Skala Global” yang selaras dengan *milestone* visi Universitas Negeri Surabaya 2035 yakni *Recognized International Research University*. Dua poin dalam Rencana Strategis Universitas Negeri Surabaya menunjang lulusan untuk dapat berkeadilan dan menjunjung tinggi keberagaman dan pendidikan berkualifikasi global serta mengembangkan potensi mahasiswa untuk berdaya saing global.

Dengan mempertimbangkan berbagai latar belakang dan permasalahan di atas, perlunya melakukan pendalaman tentang bagaimana implikasi program kewarganegaraan global dalam praktik pendidikan di perguruan tinggi khususnya Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini dirasa perlu untuk diteliti dengan alasan: *Pertama*, tuntutan perkembangan jaman dengan berbagai permasalahan global harus dijawab oleh pendidikan. *Kedua*, perlunya rumusan tentang kurikulum dan kebijakan yang berparadigma pendidikan kewarganegaraan global sehingga dapat dijadikan bahan pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia dan *ketiga* diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbang saran bagi lembaga yakni Universitas Negeri Surabaya sehingga dapat menghasilkan kebijakan pendidikan dalam menghadapi globalisasi. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjelaskan bagaimana persepsi *stakeholder* terkait isu dan urgensi pendidikan kewarganegaraan global serta bagaimana implikasi konsep pendidikan kewarganegaraan global pada aktivitas pembelajaran, lingkungan pembelajaran peserta didik serta kebijakan kurikulum pembelajaran di Universitas Negeri Surabaya.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan global yang melibatkan berbagai negara baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan dan kewarganegaraan haruslah di kaji dan diselesaikan melalui diskusi pendidikan. Oleh sebab itu, peneliti akan mengkaji bagaimana sebuah implikasi program pendidikan kewarganegaraan global terhadap pembelajaran perguruan tinggi. Adapun identifikasi masalah permasalahan dalam penelitian ini yakni:

- 1.2.1. Data tentang kekerasan, konflik, lingkungan, dampak negative TIK dan daya saing berbagai negara dalam komunitas global sulit dihindari dan harus segera dicarikan pemecahan permasalahannya.
- 1.2.2. Hasil riset yang dirilis oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) tentang keterampilan warga negara dewasa (produktif) yakni keterampilan literasi, numerik dan keterampilan mengolah data dalam komunitas digital negara Indonesia menempati posisi terendah dari negara-negara yang berpartisipasi
- 1.2.3. Berbagai riset tentang implikasi globalisasi terhadap perguruan tinggi, merekomendasikan akan kebutuhan pendidikan bagi mahasiswa pada abad 21 berupa kesadaran akan wawasan global, penggunaan teknologi dan saling menghormati antar budaya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan umum pada penelitian ini yakni bagaimana program pendidikan kewarganegaraan global di perguruan tinggi untuk membentuk wawasan global mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya. Adapun penjabaran rumusan masalah umum di atas, sebagai berikut:

- 1.3.1. Mengapa program pendidikan kewarganegaraan global menjadi isu penting pada pembelajaran di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya ?
- 1.3.2. Bagaimana implikasi program pendidikan kewarganegaraan global terhadap pengembangan aktivitas pembelajaran mahasiswa untuk menumbuhkan

wawasan global mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya ?

1.3.3. Bagaimana implikasi program pendidikan kewarganegaraan global terhadap lingkungan pembelajaran untuk menumbuhkan wawasan global mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya ?

1.3.4. Bagaimana implikasi program pendidikan kewarganegaraan global terhadap kebijakan kurikulum pembelajaran untuk menumbuhkan wawasan global mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya ?

1.4.Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan menganalisis secara objektif tentang bagaimana program pendidikan kewarganegaraan global di perguruan tinggi untuk menumbuhkan wawasan global mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya.

1.4.2. Tujuan Khusus.

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan permasalahan baik umum maupun khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan dan mengkaji persepsi civitas akademika Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya terkait isu dan urgensi Program Pendidikan Kewarganegaraan Global
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi program pendidikan kewarganegaraan global terhadap pengembangan aktivitas akademik untuk menumbuhkan wawasan global mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi program pendidikan kewarganegaraan global terhadap lingkungan pembelajaran untuk menumbuhkan wawasan global mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya

- d. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi program pendidikan kewarganegaraan global terhadap kebijakan kurikulum pembelajaran untuk menumbuhkan wawasan global mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bersifat teori, kebijakan, praktik dan isu. Adapun manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan cakrawala pengetahuan dalam disiplin ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih luas mengenai program pendidikan kewarganegaraan pada pendidikan formal, serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya yang relevan.

1.5.2. Manfaat dari segi kebijakan

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi yang membangun wawasan, keterampilan, nilai dan sikap warga global.
- b. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah terkhusus Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk membuat langkah strategis dalam menghadapi masalah kecenderungan global untuk menuju dunia yang lebih adil, toleran, inklusi dan berkelanjutan.

1.5.3. Manfaat dari segi praktik

- a. Sebagai *role model* integrasi program pendidikan kewarganegaraan di pembelajaran perguruan tinggi.
- b. Sebagai bahan masukan bagi civitas akademika akan pentingnya membangun wawasan global generasi muda dalam menghadapi berbagai permasalahan di tingkat nasional hingga global.

1.5.4. Manfaat dari segi isu dan aksi sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pencerahan dan pengalaman dalam upaya membentuk kurikulum pendidikan kewarganegaraan global pada

perguruan tinggi sehingga menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang siap terjun dan berpartisipasi dalam masyarakat tingkat lokal, nasional dan global.